



RENCANA KERJA TAHUN 2025



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025. Kami menyadari bahwa materi Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Terimakasih atas kerjasama semua pihak sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan, pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak serta OPD terkait pada Pemerintah Kota Denpasar guna penyempurnaan Penyusun Renja dimasa mendatang.

Denpasar, 05 Juli 2024

PH Camat Denpasar Selatan



Ketut Sri Kartawati, S.KM.,M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19710626 199402 2 001

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|-----------|
| Kata Pengantar | i | |
| Daftar Isi | ii | |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| 1.1 | Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 | Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan..... | 4 |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU | |
| 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra PD | 6 |
| 2.2 | Analisa Kinerja Pelayanan PD..... | 12 |
| | 2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan | 13 |
| 2.3 | Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... | 13 |
| BAB III | TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1 | Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 20 |
| 3.2 | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 20 |
| 3.3 | Program dan Kegiatan Tahun 2025..... | 20 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 26 |
| BAB V | PENUTUP..... | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran Awal daripada rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, Renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan Renja ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026 Kecamatan Denpasar Selatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2023 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2022. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis Kecamatan Denpasar Selatan, baik di Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun Nasional.

Peningkatan pelayanan public yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*); peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan; dan penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan tri Hita Karana, yang mana reformasi pada sektor ekonomi pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang mengarahkan semua unsur yang mempengaruhi Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) berdasarkan hal tersebut, disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah di rubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
18. Peraturan Walikota Denpasar nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good govenance* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan Visi dan Misi.

Penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahun pertama dari pada Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2025 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi Renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Denpasar

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 | Tingkat Capaian Ralisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 7 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah | 16,855,020,210 | 18,747,198,481 | 21,322,769,383 | 14,310,769,413 | 67% | 24,593,265,510 | 57,651,233,404 | 342% |
| 7 01 01 2.02 | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 16,855,020,210 | 10,527,117,152 | 11,087,695,301 | 7,970,646,337 | 72% | 13,895,572,291 | 32,393,335,780 | 192% |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 16,855,020,210 | 10,524,117,152 | 11,084,695,301 | 7,969,146,337 | 72% | 13,895,572,291 | 32,388,835,780 | 192% |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 50% | - | 4,500,000 | 0% |
| 7 01 01 2.05 | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | <i>Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 99,825,000 | 0 | 0 | - | 0% | - | - | 0% |
| 7 01 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN | 99,825,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% |
| 7 01 01 2.06 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 1,539,449,292 | 819,279,859 | 1,645,377,816 | 1,062,674,308 | 65% | 1,316,585,000 | 3,198,539,167 | 208% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30,212,235 | 21,357,739.00 | 24,324,839.00 | 20,657,000 | 85% | 25,015,500 | 67,030,239 | 222% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1,164,554,229 | 567,919,720.00 | 1,334,040,984.00 | 854,609,958 | 64% | 976,893,000 | 2,399,422,678 | 206% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan | 213,156,070 | 149,098,400.00 | 199,649,243.00 | 127,251,350 | 64% | 239,436,500 | 515,786,250 | 242% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Surat Kabar/Majalah | 131,526,758 | 80,904,000.00 | 87,362,750.00 | 60,156,000 | 69% | 75,240,000 | 216,300,000 | 164% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | Tersedianya Barang Milik Daerah | 730,109,402 | 79,176,000 | 59,007,482 | 51,300,000 | 87% | 196,779,000 | 327,255,000 | 45% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | - | 0 | 0 | - | 0% | - | - | 0% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | - | 0 | 0 | - | 0% | - | - | 0% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 9 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai | 730,109,402 | 79,176,000 | 59,007,482 | 51,300,000 | 87% | 196,779,000 | 327,255,000 | 45% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7,953,153,705 | 6,614,217,464 | 6,942,254,286 | 4,600,530,112 | 66% | 7,992,158,844 | 19,206,906,420 | 242% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 577,920,200 | 298,246,143 | 514,826,592 | 236,594,383 | 46% | 520,010,400 | 1,054,850,926 | 183% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 300,761,332 | 172,522,850 | 61,781,456 | 25,475,000 | 41% | 43,743,000 | 241,740,850 | 80% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7,074,472,173 | 6,143,448,471 | 6,365,646,238 | 4,338,460,729 | 68% | 7,428,405,444 | 17,910,314,644 | 253% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 2,896,672,836 | 707,408,006 | 1,588,434,498 | 625,618,656 | 39% | 1,192,170,375 | 2,525,197,037 | 87% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 83,453,700 | 44,283,300 | 53,722,550 | 30,809,000 | 57% | 45,860,000 | 120,952,300 | 145% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 789,155,334 | 423,640,280 | 595,363,303 | 297,026,000 | 50% | 574,061,000 | 1,294,727,280 | 164% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Mebel | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 11,646,250 | 8,670,000 | 6,194,000 | 1,500,000 | 24% | 3,540,000 | 13,710,000 | 118% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1,434,626,096 | 35,608,526 | 419,765,865 | 167,386,556 | 40% | 231,139,375 | 434,134,457 | 30% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 577,791,456 | 195,205,900 | 513,388,780 | 128,897,100 | 25% | 337,570,000 | 661,673,000 | 115% |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat | 1,222,669,005 | 189,889,900 | 258,541,398 | 223,247,415 | 86% | 361,069,250 | 774,206,565 | 63% |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan | 1,222,669,005 | 145,390,400 | 203,887,880 | 170,906,165 | 84% | 214,763,250 | 531,059,815 | 43% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | 60,308,675 | 24,679,400 | 39,883,131 | 35,908,131 | 90% | 48,350,250 | 108,937,781 | 181% |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu | 1,162,360,330 | 120,711,000 | 164,004,749 | 134,998,034 | 82% | 166,413,000 | 422,122,034 | 36% |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat | 69,212,000 | 44,499,500 | 54,653,518 | 52,341,250 | 96% | 146,306,000 | 243,146,750 | 351% |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 69,212,000 | 44,499,500 | 54,653,518 | 52,341,250 | 96% | 146,306,000 | 243,146,750 | 351% |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 6,752,241,356 | 6,213,405,420 | 4,975,479,703 | 2,935,828,863 | 59% | 4,610,754,335 | 13,759,988,618 | 204% |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 6,752,241,356 | 6,213,405,420 | 4,975,479,703 | 2,935,828,863 | 59% | 4,610,754,335 | 13,759,988,618 | 204% |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan | 16,705,248 | 11,175,500.00 | 14,129,290.00 | 0 | 0% | 13,954,350 | 25,129,850 | 150% |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan | 2,751,443,200 | 2,038,332,400.00 | 2,072,267,503.00 | 1,055,907,113 | 51% | 2,158,667,485 | 5,252,906,998 | 191% |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3,984,092,908 | 4,163,897,520.00 | 2,889,082,910.00 | 1,879,921,750 | 65% | 2,438,132,500 | 8,481,951,770 | 213% |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1,025,138,862 | 657,157,450 | 747,193,911 | 414,567,850 | 55% | 1,217,667,750 | 2,289,393,050 | 223% |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | 1,025,138,862 | 657,157,450 | 747,193,911 | 414,567,850 | 55% | 1,217,667,750 | 2,289,393,050 | 223% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|---------------|---------------|------|
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan | 1,025,138,862 | 657,157,450 | 747,193,911 | 414,567,850 | 55% | 1,217,667,750 | 2,289,393,050 | 223% |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan | 160,052,750 | 99,262,500 | 159,924,647 | 131,016,103 | 82% | 187,978,150 | 418,256,753 | 261% |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | <i>Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan</i> | 160,052,750 | 99,262,500 | 159,924,647 | 131,016,103 | 0 | 187,978,150 | 418,256,753 | 261% |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar | 126,777,750 | 81,762,500 | 129,774,647 | 119,121,103 | 0 | 160,978,150 | 361,861,753 | 285% |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan | 33,275,000 | 17,500,000 | 30,150,000 | 11,895,000 | 0 | 27,000,000 | 56,395,000 | 169% |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan | 78,197,581 | 17,925,000 | 16,050,000 | 2,775,000 | 17% | 15,825,000 | 36,525,000 | 47% |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | <i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa</i> | 78,197,581 | 17,925,000 | 16,050,000 | 2,775,000 | 17% | 15,825,000 | 36,525,000 | 47% |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Evaluasi RAPBDes | 78,197,581 | 17,925,000 | 16,050,000 | 2,775,000 | 17% | 15,825,000 | 36,525,000 | 47% |

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Denpasar Selatan merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Denpasar Selatan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan. Pencapaian IKU Kecamatan Denpasar Selatan tersaji dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian IKU Kecamatan Denpasar Selatan

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI |
|-----|--|---------------------------------------|--------|-----------|
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat | Indek Kepuasan Masyarakat | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah | Presentase Koordinasi yang Terlaksana | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa | Jumlah Desa yang dibina | 100% | 100% |

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2022 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI |
|-----|---|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat | Indek Kepuasan Masyarakat | 258.541.398 | 245.469.398 |
| | Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah | Presentase Koordinasi yang Terlaksana | 31.298.069.967 | 28.458.609.327 |
| | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Jumlah Desa yg Dibina | 16.050.000 | 14.100.000 |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kecamatan Denpasar Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2022, Kecamatan Denpasar Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Pertumbuhan wilayah yang sangat dinamis dan cepat, tetapi dengan keterbatasan ketersediaan lahan non pertanian menjadikan permasalahan yang kompleks diwilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Sehingga alih lahan pertanian menjadi non pertanian yang nantinya dipergunakan sebagai area perumahan pemukiman baru.

Faktor wilayah Kecamatan Denpasar Selatan sebagai wilayah aglomerasi perkotaan menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen perumahan dan kalangan bisnis property. Salah satu upaya dengan permasalahan keterbatasan lahan dengan banyaknya pembangunan. Plus minus adanya hunian vertikal adalah faktor dampak sosial.

A. Kondisi Eksternal dan Internal Dari gambaran umum di atas perlu diungkapkan dengan jelas faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan faktor-faktor kunci keberhasilan dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur strategis yang dapat memberikan muatan untuk proses pencapaian visi dan misi Kecamatan Denpasar Selatan.

Dengan menggunakan analisis SWOT diperoleh gambaran lingkungan internal dan eksternal guna penetapan kunci-kunci keberhasilan sebagai berikut :

1 .Kondisi Internal

1) Potensi yang dimiliki (Kekuatan/Strength)

- Potensi luas wilayah yang merupakan pengembangan area bisnis, jasa dan pendidikan dapat menjadikan penggerak roda perekonomian masyarakat setempat baik dengan usaha dibidang property, kuliner maupun penginapan (kost-kostan dan hotel)
- Kemampuan masyarakat yang tinggi dalam berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan penghasilan dengan berbagai sumber daya yang ada.
- Karakteristik masyarakat yang aspiratif.
- Aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan pegawai yang memadai dan relatif berkualitas di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- Adanya sumber dana APBD.
- Motivasi kerja pegawai cukup tinggi.
- Jelasnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Denpasar Selatan.

2) Kelemahan (Weakness)

- Pemanfaatan lahan yang berorientasi ekonomi dan cenderung mengabaikan ekosistem/kelestarian lingkungan.

- Dorongan dan kemauan yang masih lemah pada masyarakat dalam upaya meningkatkan penghasilan.
- Jumlah dan kualitas pegawai kurang dibarengi dengan disiplin, upaya pemeliharaan skill (kemampuan & ketrampilan) yang kontinyu dalam penyesuaian dengan tuntutan/dinamika masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik/prima dari aparat pemerintah.
- Pengolahan manajemen pemerintah yang belum efektif dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, sumber daya organisasi (aparat, dana dan peralatan) kurang dapat dimanfaatkan secara efisien, sehingga terjadi tugas dan fungsi yang kurang tertangani.

2. Kondisi Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Image tentang kawasan Kecamatan Denpasar Selatan yang merupakan perkembangan kawasan kota menjadikan nilai lahan selalu meningkat.
2. Pemahaman akan kedudukan Kecamatan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari masyarakat, desa, instansi sentral terkait di Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah mampu memenuhi kebutuhan bersama lingkungan sekitarnya dalam kehidupan masyarakat masih tinggi.

B. Tantangan (Threats)

1. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya yang ada baik dengan tujuan ekonomis maupun pelestarian lingkungan.
2. Tuntutan pelayanan publik yang harus selalu lebih baik dari masyarakat, tanpa melihat sumber daya organisasi.
3. Kondisi kesehatan lingkungan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang masih perlu mendapat prioritas dan perhatian.
4. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat masih perlu perhatian.

Kondisi Aparatur Keberadaan Pegawai pada Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pegawai sumber daya manusia merupakan salah satu komponen untuk mencapai kesuksesan suatu tujuan. Peran pegawai yang merupakan pemikir, perencana dan pelaksana keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Camat menentukan keberhasilan pencapaian visi, misi, dan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar. Sumber daya manusia pada Kecamatan Denpasar Selatan yang ada pada saat ini diberdayakan seoptimal mungkin untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

C. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pelayanan di Kecamatan Denpasar Selatan diuraikan dalam klasifikasi tiap-tiap Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat antara lain:
 - a. Pengelolaan arsip yang belum optimal.
 - b. Pengelolaan perpustakaan yang belum optimal
 - c. Pengelolaan keuangan yang belum optimal.
 - d. Perencanaan yang kurang optimal.
 - e. Pengelolaan dokumen kepegawaian yang belum optimal
 - f. Perlu data monografi yang valid untuk penentu kebijakan

2. Seksi Pemerintahan
Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan antara lain:
 - a) Masih sering terjadinya konflik konflik pertanahan.
 - b) Meningkatnya pemanfaatan tanah yang belum berizin.
 - c) Masih lemahnya pemahaman perangkat Kelurahan tentang administrasi pemerintahan.

- d) Belum maksimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan Desa.
- e) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban antara lain :

- a) Lemahnya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- b) Lemahnya penertiban PKL
- c) Lemahnya pemahaman tentang peraturan per Undang-Undangan.
- d) Tindak kriminal cenderung meningkat
- e) Kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah.
- f) Pengetahuan masyarakat tentang antisipasi bencana masih rendah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- a) Belum tercipta iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi masyarakat.
- b) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c) Terbatasnya pemberian stimulant pembangunan Desa dan Dusun.
- d) Belum optimalnya potensi daerah yang harus dikelola.
- e) Data kemiskinan yang kurang valid.
- f) Kurang optimalnya penggunaan bantuan pemberdayaan masyarakat.
- g) Penyusunan Siklus tahunan Desa dan APBDes tidak tepat waktu.
- h) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan Desa.
- i) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan desa

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat antara lain :

- a) Kurangnya peranserta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- b) Belum tertanganinya masalah-masalah sosial masyarakat.
- c) Penanganan kesehatan masyarakat belum optimal.
- d) Perlu pengembangan kesenian di masyarakat.
- e) Belum optimalnya pelestarian adat budaya dan tradisi masyarakat

6. Seksi Pelayanan Umum

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Umum antara lain:

- a) Masih lemahnya validitas data kependudukan.
- b) Lemahnya pemahaman mempunyai KTP dan KK
- c) Semakin tingginya pelayanan publik yang harus ditangani.
- d) Peningkatan jumlah penduduk dan masuk penduduk
- e) Jaringan perekaman data SIAK yang sering terganggu.
- f) Kurang lengkapnya persyaratan permohonan ijin- ijin.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah guna meningkatkan kapasitas pegawai perlu dilakukan bimbingan, motivasi, inovasi yang tinggi untuk mendukung itu diperlukan diklat dan kursus ilmu tehnologi modern, serta untuk meningkatkan pelayanan sangat diperlukan infrastruktur sarana dan prasarana yang cukup guna menunjang kelancaran kerja.

D. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dalam penyusunan prioritas tahun yang direncanakan:

- a. Perlu adanya tuntutan untuk melaksanakan perubahan tata kelola pemerintahan dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berpotensi.

- b. Perlu adanya pendelegasian kewenangan yang dapat dilakukan oleh Kecamatan, walaupun sebenarnya sudah ada kewenangan yang bersifat atributif tetapi masih perlu diikuti kewenangan delegatif.
- c. Perlu adanya arah kebijaksanaan yang jelas terhadap pengembangan dan penataan wilayah terutama pada titik-titik pembangunan wilayah sesuai dengan pengembangan dan peruntukannya.
- d. Perubahan fungsi lahan yang sangat pesat mengingat Kecamatan Denpasar Selatan merupakan daerah pengembangan kawasan perkotaan yang mengalami perkembangan sangat pesat sehingga perlu inovasi baru dalam penanganannya dengan teknologi yang ada.
- e. Infrastruktur sarana dan prasarana yang ada masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan sehingga masih perlu untuk ditingkatkan pembangunannya.
- f. Peluang kerja dan lapangan kerja yang ada cukup banyak tetapi tidak diimbangi dengan keahlian dan ketrampilan bagi calon pencari kerja, sehingga perlu adanya diklat bagi calon pencari kerja.
- g. Angka kemiskinan di Kecamatan Denpasar Selatan masih cukup tinggi dan masih perlu penanganan yang serius, sehingga pendampingan dari stakeholder sangat diharapkan baik bimbingan, pelatihan dan penguatan modal usaha bagi KK miskin

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta seluruh stakeholders untuk mendapatkan suatu input rencana pembangunan prioritas yang bertitik tolak dari permasalahan serta hambatan-hambatan yang ada, dalam pengembangan rencana program di daerah diperlukan harmonisasi terkait penyelenggaraan pembangunan untuk sinergitas antara lembaga pusat dan daerah.

Kecamatan Denpasar Selatan sebagai perangkat daerah Kota Denpasar memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Denpasar Selatan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Selatan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Selatan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2025 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita-cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai, maka Tujuan dan sasaran Renja merupakan suatu penjabaran atau

implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintah namun berdasarkan pada kriteria-kriteria dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN |
|-----|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 |
| 1 | <i>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan</i> | Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat | Indek Kepuasan Masyarakat | 100% |
| | | Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah | Presentase Koordinasi yang Terlaksana | 100% |
| | | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yg Dibina | 100% |

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program / kegiatan dalam tahun 2025 guna mencapai visi dan misi Walikota bahwa Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar telah menetapkan tujuan dan sasaran guna meningkatkan perkembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Kecamatan Denpasar Selatan.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
 Kota Denpasar

Kecamatan Denpasar Selatan

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Catatan |
|-----|--|----------------------------|--|---------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Denpasar Selatan | Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah | |
| a. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Denpasar Selatan | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | |
| b. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kecamatan Denpasar Selatan | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN | |
| c. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| - | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga | |
| - | Penyediaan Bahan Logistik | Kecamatan Denpasar Selatan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | |
| - | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan | |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------------------|---|--|
| - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kecamatan Denpasar Selatan | Tersedianya Surat Kabar/Majalah | |
| d. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | Kecamatan Denpasar Selatan | Tersedianya Barang Milik Daerah | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Denpasar Selatan | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Denpasar Selatan | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai | |
| e. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Denpasar Selatan | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| - | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| f. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | |
| - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Denpasar Selatan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Denpasar Selatan | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Denpasar Selatan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat | |
| a. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Denpasar Selatan | Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan | |
| - | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kecamatan Denpasar Selatan | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | |
| - | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Denpasar Selatan | Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu | |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|--|--|
| b. | <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i> | Kecamatan Denpasar Selatan | <i>Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat</i> | |
| - | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Kecamatan Denpasar Selatan | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Denpasar Selatan | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | |
| a. | <i>Pemberdayaan Kelurahan</i> | Kecamatan Denpasar Selatan | <i>meningkatnya persentase pembangunan daerah</i> | |
| - | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kecamatan Denpasar Selatan | usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan | |
| - | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kecamatan Denpasar Selatan | Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia | |
| - | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Denpasar Selatan | Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Denpasar Selatan | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| a. | <i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i> | Kecamatan Denpasar Selatan | <i>Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i> | |
| - | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kecamatan Denpasar Selatan | Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kecamatan Denpasar Selatan | Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan | |
| a. | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Kecamatan Denpasar Selatan | <i>Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan</i> | |
| - | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kecamatan Denpasar Selatan | Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar | |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------------|--|--|
| - | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Denpasar Selatan | Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kecamatan Denpasar Selatan | Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan | |
| a. | <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | Kecamatan Denpasar Selatan | <i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa</i> | |
| - | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Kecamatan Denpasar Selatan | Terlaksananya Evaluasi RAPBDes | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Kecamatan Denpasar Selatan.

Rencana kerja Kecamatan Denpasar Selatan dalam Tahun 2025 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Usulan Kegiatan Yang akan dilaksanakan dalam TA. 2025
Oleh Kecamatan Denpasar Selatan

Kecamatan Denpasar Selatan

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | Targert Capaian Kineja | Pagu Indikatif 2025 (Rp.) | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.) |
|------|----|----|-------|----|---|---|------------------------|---------------------------|---|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | | | | | URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 15,726,912,652 | 15,726,912,652 |
| 7 | 01 | 01 | 02.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 14,057,026,052 | 14,057,026,052 |
| 7 | 01 | 01 | 02.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 80 Orang/bulan | 14,057,026,052 | 14,057,026,052 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|---|--|-------------|--------------------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor | 100% | 321,537,200 | 321,537,200 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 7,196,000 | 7,196,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 245,144,650 | 245,144,650 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 06 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | 1 paket | 60,556,550 | 60,556,550 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 paket | 8,640,000 | 8,640,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 120,246,000 | 120,246,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 120,246,000 | 120,246,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 852,947,400 | 852,947,400 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|--|---|-------------|--------------------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 154,200,000 | 154,200,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 02 | Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 laporan | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 698,747,400 | 698,747,400 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 375,156,000 | 375,156,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 43,972,000 | 43,972,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia | 14 Unit | 148,804,000 | 148,804,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 91,380,000 | 91,380,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 11 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | 91,000,000 | 91,000,000 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan | 83% | 247,155,250 | 247,155,250 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|--|---|-------------|--------------------|--------------------|
| 7 | 01 | 02 | 02.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Survey Kepuasan Masyarakat | 100% | 205,349,250 | 205,349,250 |
| 7 | 01 | 02 | 02.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencom) | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 75,598,250 | 75,598,250 |
| 7 | 01 | 02 | 02.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 129,751,000 | 129,751,000 |
| 7 | 01 | 02 | 02.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Survey Kepuasan Masyarakat | 100% | 41,806,000 | 41,806,000 |
| 7 | 01 | 02 | 02.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | 41,806,000 | 41,806,000 |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 171,979,000 | 171,979,000 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Kasus yang ditangani | 100% | 171,979,000 | 171,979,000 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | 171,979,000 | 171,979,000 |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan | 100% | 177,078,150 | 177,078,150 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-------|----|---|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 8 | 01 | 05 | 02.01 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 177,078,150 | 177,078,150 |
| 9 | 01 | 05 | 02.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaopkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang | 162,378,150 | 162,378,150 |
| 9 | 01 | 05 | 02.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 14,700,000 | 14,700,000 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA | persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan | 100% | 17,725,000 | 17,725,000 |
| 8 | 01 | 06 | 02.01 | | Failitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan | 100% | 17,725,000 | 17,725,000 |
| 9 | 01 | 06 | 02.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 4 Dokumen | 17,725,000 | 17,725,000 |
| Total | | | | | | | | 16,340,850,052 | 16,340,850,052 |

Kelurahan Pedungan

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | Targert Capaian Kineja | Pagu Indikatif 2025 (Rp.) | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.) |
|------|----|----|-------|----|---|--|------------------------|---------------------------|---|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | | | | | URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 1,741,664,322 | 1,741,664,322 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor | 100% | 196,362,050 | 196,362,050 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 3,497,000 | 3,497,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 157,066,900 | 157,066,900 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 06 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 25,358,150 | 25,358,150 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 paket | 10,440,000 | 10,440,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 0 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 1,234,874,272 | 1,234,874,272 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 53,400,000 | 53,400,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|---|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 02 | Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 1,179,274,272 | 1,179,274,272 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 310,428,000 | 310,428,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia | 14 Unit | 91,953,000 | 91,953,000 |
| | 01 | 01 | 02.10 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | 2,460,000 | 2,460,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 187,195,000 | 187,195,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | 28,820,000 | 28,820,000 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100% | 1,430,547,650 | 1,430,547,650 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | | Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah | 100% | 1,430,547,650 | 1,430,547,650 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 01 | Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 lembaga | 2,615,000 | 2,615,000 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | 350,000,000 | 350,000,000 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 1,077,932,650 | 1,077,932,650 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-------|----|--|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 231,940,600 | 231,940,600 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Kasus yang ditangani | 100% | 231,940,600 | 231,940,600 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | 231,940,600 | 231,940,600 |
| Total | | | | | | | | 3,404,152,572 | 3,404,152,572 |

Kelurahan Sesetan

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | Targert Capaian Kineja | Pagu Indikatif 2025 (Rp.) | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.) |
|------|----|----|-------|----|---|--|------------------------|---------------------------|---|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | | | | | URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 2,114,393,692 | 2,114,393,692 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor | 100% | 257,065,700 | 257,065,700 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 2,702,000.00 | 2,702,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 219,738,400.00 | 219,738,400.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 06 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | 1 paket | 24,185,300.00 | 24,185,300.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 paket | 10,440,000.00 | 10,440,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|---|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 121,600,000 | 121,600,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 121,600,000.00 | 121,600,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 1,419,592,992 | 1,419,592,992 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 73,800,000.00 | 73,800,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 02 | Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 1,336,792,992.00 | 1,336,792,992.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 316,135,000 | 316,135,000 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia | 14 Unit | 66,675,000.00 | 66,675,000.00 |
| | 01 | 01 | 02.10 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 237,000,000.00 | 237,000,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | 12,460,000.00 | 12,460,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100% | 1,327,386,150 | 1,327,386,150 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | | Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah | 100% | 1,327,386,150 | 1,327,386,150 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-------|----|--|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 01 | Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 lembaga | 2,971,950.00 | 2,971,950.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 974,414,200.00 | 974,414,200.00 |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 274,869,600 | 274,869,600 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Kasus yang ditangani | 100% | 274,869,600 | 274,869,600 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | 274,869,600.00 | 274,869,600.00 |
| Total | | | | | | | | 3,716,649,442 | 3,716,649,442 |

Kelurahan Serangan

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | Targert Capaian Kineja | Pagu Indikatif 2025 (Rp.) | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.) |
|------|----|----|-------|--|---|---|------------------------|---------------------------|---|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | | | | | URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan layanan sekretariat | 100% | 1,412,941,304.00 | 1,412,941,304.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor | 100% | 183,865,800.00 | 183,865,800.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|--|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 3,789,000.00 | 3,789,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 137,637,000.00 | 137,637,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 06 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan | 1 paket | 31,999,800.00 | 31,999,800.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 paket | 10,440,000.00 | 10,440,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 32,875,000.00 | 32,875,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 32,875,000.00 | 32,875,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 876,442,280.00 | 876,442,280.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 02 | Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 816,642,280.00 | 816,642,280.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 319,758,224.00 | 319,758,224.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia | 14 Unit | 90,886,000.00 | 90,886,000.00 |
| | 01 | 01 | 02.10 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 192,492,224.00 | 192,492,224.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | 34,220,000.00 | 34,220,000.00 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100% | 982,414,000.00 | 982,414,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | | Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah | 100% | 982,414,000.00 | 982,414,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 01 | Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 lembaga | 2,685,000.00 | 2,685,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | 301,700,000.00 | 301,700,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 678,029,000.00 | 678,029,000.00 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 224,634,600.00 | 224,634,600.00 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Kasus yang ditangani | 100% | 224,634,600.00 | 224,634,600.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-------|----|--|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | 224,634,600.00 | 224,634,600.00 |
| Total | | | | | | | | 2,619,989,904.00 | 2,619,989,904.00 |

Kelurahan Panjer

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | Targert Capaian Kineja | Pagu Indikatif 2025 (Rp.) | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.) |
|------|----|----|-------|----|---|--|------------------------|---------------------------|---|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5.00 | 6.00 |
| 7 | | | | | URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 1,162,255,317.00 | 1,162,255,317.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor | 100% | 178,658,501.00 | 178,658,501.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 4,941,000.00 | 4,941,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 135,580,601.00 | 135,580,601.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 06 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | 1 paket | 24,561,900.00 | 24,561,900.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 paket | 13,575,000.00 | 13,575,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|---|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 792,956,816.00 | 792,956,816.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 02 | Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 525,000.00 | 525,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 729,431,816.00 | 729,431,816.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 190,640,000.00 | 190,640,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia | 14 Unit | 59,730,000.00 | 59,730,000.00 |
| | 01 | 01 | 02.10 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | 115,910,000.00 | 115,910,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100% | 1,123,925,400.00 | 1,123,925,400.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | | Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah | 100% | 1,123,925,400.00 | 1,123,925,400.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-------|----|--|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 01 | Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 lembaga | 1,730,100.00 | 1,730,100.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | 371,000,000.00 | 371,000,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 751,195,300.00 | 751,195,300.00 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 237,559,660.00 | 237,559,660.00 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Kasus yang ditangani | 100% | 237,559,660.00 | 237,559,660.00 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | 237,559,660.00 | 237,559,660.00 |
| | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | 2,523,740,377.00 | 2,523,740,377.00 |

Kelurahan Renon

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | Targert Capaian Kineja | Pagu Indikatif 2025 (Rp.) | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.) |
|------|----|----|--|--|---|---|------------------------|---------------------------|---|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | | | | | URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 1,016,353,486.00 | 1,016,353,486.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|---|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor | 100% | 124,038,350.00 | 124,038,350.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 2,042,000.00 | 2,042,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 91,794,250.00 | 91,794,250.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 06 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | 1 paket | 19,762,100.00 | 19,762,100.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 paket | 10,440,000.00 | 10,440,000.00 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 2,578,000.00 | 2,578,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2,578,000.00 | 2,578,000.00 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 789,053,136.00 | 789,053,136.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|---|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 02 | Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 30,786,000.00 | 30,786,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 683,267,136.00 | 683,267,136.00 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100,684,000.00 | 100,684,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia | 14 Unit | 62,928,000.00 | 62,928,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 9,916,000.00 | 9,916,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | 27,840,000.00 | 27,840,000.00 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100% | 1,074,845,010.00 | 1,074,845,010.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | | Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah | 100% | 1,074,845,010.00 | 1,074,845,010.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 01 | Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 lembaga | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | 388,443,010.00 | 388,443,010.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-------|----|--|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 684,352,000.00 | 684,352,000.00 |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 211,215,600.00 | 211,215,600.00 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Kasus yang ditangani | 100% | 211,215,600.00 | 211,215,600.00 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | 211,215,600.00 | 211,215,600.00 |
| Total | | | | | | | | 2,302,414,096.00 | 2,302,414,096.00 |

Kelurahan Sanur

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | Targert Capaian Kineja | Pagu Indikatif 2025 (Rp.) | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.) |
|------|----|----|-------|----|---|--|------------------------|---------------------------|---|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | | | | | URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 1,111,376,950.00 | 1,111,376,950.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor | 100% | 168,851,942.00 | 168,851,942.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 3,020,500.00 | 3,020,500.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|---|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 129,477,992.00 | 129,477,992.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 06 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan | 1 paket | 25,913,450.00 | 25,913,450.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.06 | 07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 paket | 10,440,000.00 | 10,440,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 22,350,000.00 | 22,350,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.07 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 22,350,000.00 | 22,350,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 801,693,008.00 | 801,693,008.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 65,100,000.00 | 65,100,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 02 | Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 735,113,008.00 | 735,113,008.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 118,482,000.00 | 118,482,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia | 14 Unit | 71,242,000.00 | 71,242,000.00 |
| | 01 | 01 | 02.10 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|-------|----|--|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | 25,860,000.00 | 25,860,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100% | 1,032,218,000.00 | 1,032,218,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | | Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah | 100% | 1,032,218,000.00 | 1,032,218,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 01 | Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 lembaga | 1,438,000.00 | 1,438,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 02.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 680,780,000.00 | 680,780,000.00 |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 222,098,600.00 | 222,098,600.00 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Kasus yang ditangani | 100% | 222,098,600.00 | 222,098,600.00 |
| 7 | 01 | 04 | 02.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | 222,098,600.00 | 222,098,600.00 |
| Total | | | | | | | | 2,365,693,550.00 | 2,365,693,550.00 |

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan 6 (enam) program dengan 12 (Dua belas) kegiatan dan 28 (Dua puluh delapan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 33.273.489.993.00,-

Rencana Rancangan Program Kerja Kecamatan Denpasar Selatan ini merupakan program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada periode tahun 2025. Rencana Program ini hanya merupakan program Kecamatan Denpasar Selatan, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Kecamatan di Kota Denpasar. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses Kecamatan Denpasar Selatan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Denpasar, 05 Juli 2024

Ketua Camat Denpasar Selatan



Ketut Sri Kar yawati, S.KM.,M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19710626 199402 2 001